

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
LEMBAR ORISINALITAS TESIS.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Sistematika	16

BAB II KONTRUKSI HUKUM KONTRAK ANTARA PENGGUNA LAYANAN YOUTUBE (YOUTUBER) DENGAN PIHAK PENYEDIA LAYANAN YOUTUBE

2.1. Perkembangan dan Makna Kontrak.....	17
2.2. Asas-asas Hukum Kontrak	24
2.2.1. Kebebasan Berkontrak.....	25
2.2.2. Asas <i>Privity of Contract</i>	27
2.2.3. Asas Konsensualisme	29
2.2.4. Asas Itikat baik.....	32
2.3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Kontrak.....	34
2.3.1. Kesepakatan Para Pihak	35
2.3.2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan	45
2.3.3. Suatu Hal Tertentu.....	49
2.3.4. Kausa yang Diperbolehkan.....	51
2.4. Fungsi Kontrak.....	52
2.5. Kontrak Konsumen dan Komersial	52
2.6. Karakteristik Kontrak YouTube.....	58

BAB III KEABSAHAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR

3.1 Konsep Dasar Pemungutan Pajak	62
3.1.1. Pengertian Pajak	62
3.1.2. Fungsi Pajak	63
3.1.3. Stelse Pemungutan Pajak.....	65
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	66
3.1.5. Asas Pemungutan Pajak	68
3.2. Pajak Penghasilan	71
3.2.1. Subjek Pajak	73
3.2.2. Objek Pajak	77
3.2.3. Wajib Pajak	77
3.3. Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Anak di Indonesia	82
3.4. Pemungutan Pajak Bagi Youtuber dibawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan anak serta Konvensi hak-hak anak Anak	89

BAB IV KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan	97
4.2. Saran	98

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weboek*) Staatsblaad nomor 23 tahun 1847

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Nomor 186, Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/PDT/1985,
tanggal 4 Maret 1987

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
551/Pdt.G/2000.PN.Jkt.PS, tanggal 26 Juni 2001

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976,
tanggal 13 Oktober 1979.

Daftar Gambar

Gambar 2.1	28
Gambar 2.2	30
Gambar 2.3	33

Daftar Tabel

Tabel 3.1 **85**